



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Isbath Nikah terpadu telah menjatuhkan Penetapan Tentang permohonan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon I”

PEMOHON II, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagai “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 24 Maret 1999, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 57 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 53 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasiranto dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Suripto dan Dahlan, dengan maskawinya uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia lima orang anak bernama :1, ANAK 1, tanggal lahir 26 Nopember 1980;2. ANAK 2, tanggal lahir 17 Juli 1982; 3.ANAK 3, tanggal lahir 20 Agustus 1993; 4.ANAK 4 , tanggal lahir 03 Mei 1996; 5. ANAK 5, Tanggal Lahir 16 Nofember 1998;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersbut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Hakim Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan (mengisbatkan) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa

Hal 3 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam permohonannya yang untuk selengkapnya dapat dilihat pada Berita

Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SURATNO Bin KROMO WIYOSO (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), Nomor : 1808081804070026, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Way Kanan tanggal 21 Nopember 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

B Saksi:

1 SAKSI 1, sebagai Pemohon I dan Pemohon II menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon I adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 24 Maret 1999, RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasiranto dan maskawin uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 2 orang saksi Suripto dan Dahlan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 57 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 53 tahun;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
 - Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang orang anak ;
 - Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah karena sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak;
- 1 SAKSI 2, sebagai Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 5 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 24 Maret 2014, RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wasiranto dan maskawin uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta 2 orang saksi Suripto dan Dahlan;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 57 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 53 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Permohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang orang anak ;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah karena sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Maret 1999, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dengan wali nikah orang tua Pemohon II Wasiranto dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama Suripto dan Dahlan, dengan maskawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I

Hal 7 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejaka. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan masyarakat tidak ada yang meragukan atau meresahkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak dan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah dan bukti apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan pasal 49 ayat (1) huruf a dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang ABDUL KHAER BIN ABDUL LATIEF, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 1999 yang dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan maskawinya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi, pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah karena sejak menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 9 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IMAM ROHANI BIN M.FATAH, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2014 yang dilaksanakan secara Islam dengan ijab dan qabul dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan maskawinya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) saksi, pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, sampai sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam dan Pemohon I dan Pemohon II men gajukan permohonan isbath nikah karena sejak menikah tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Wasiranto ayah Kandung Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama Suropto dan Dahlan, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan masyarakat tidak ada yang meragukan atau meresahkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri., Antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak dan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah dan bukti apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Hakim dapat diperoleh fakta hukum telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Maret 1999 di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan

Hal 11 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah yang bernama Wasiranto dengan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama Suripto dan Dahlan dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Artinya “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu “;

- 2 Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. ;

- 3 Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

“Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

- 4 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawina adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1999 di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan telah memenuhi syarat rukun pernikahan menurut Agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku berdasar pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon tersebut dapat diisbatkan, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1999 di RT.005, RW.002, Dusun II, Kampung Karya Jaya Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu, Way Kanan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hirriyah oleh **Drs. H. ALI SOFWAN** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **REDOYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

REDOYATI, S.H., M.H.

Drs. H. ALI SOFWAN

Perincian biaya :

- | | | | | |
|---|-------------|---|----|----------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2 | Proses | : | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	100.000,-
4	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Meterai	:	Rp	6.000,-
J u m l a h			Rp	191.000,-

Hal 15 dari 15 Hal Pts. No : 0019/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)